

A close-up photograph of chess pieces on a dark, reflective board. In the foreground, a white king piece stands prominently on the left, and a single black pawn is positioned on the right. The background is dark and out of focus, showing other pieces. The lighting creates highlights on the pieces and the board's surface.

RELASI ANTARA ANGGOTA ANGGOTA DPR DAN KONSTITUEN PASCA PEMILU

ZULFIKAR ARSE SADIKIN S.I.P,M.Si

MODEL REPRESENTASI (BINTA R SARAGIH)

Pertama, anggota parlemen bertindak sebagai wali (trustee). Di sini anggota parlemen bebas bertindak atau mengambil keputusan menurut pertimbangannya sendiri tanpa perlu berkonsultasi dengan yang diwakilinya. Dengan kata lain, anggota legislatif tidak diharuskan berkonsultasi dengan yang diwakilinya atau konstituen. Anggota legislatif betul-betul memperoleh kepercayaan dari rakyat melalui pemilu, sehingga posisinya sangat independen

Kedua, anggota legislatif bertindak sebagai utusan (delegate). Di sini anggota legislatif bertindak sebagai utusan atau duta dari yang diwakilinya, anggota legislatif selalu mengikuti instruksi dan petunjuk dari yang diwakilinya dalam melaksanakan tugasnya. Pendek kata, dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, anggota legislatif harus selalu mengikuti keinginan dan petunjuk dari yang diwakilinya



Ketiga, anggota legislatif bertindak sebagai politico. Di sini anggota legislatif kadang-kadang bertindak sebagai wali (trustee) dan ada kalanya bertindak sebagai utusan (delegate). Tindakannya tergantung dari isu (materi) yang dibahas. Dengan kata lain, anggota legislatif dapat bertindak bebas karena legitimasinya, tetapi dalam situasi tertentu ia harus bertindak sebagai utusan dan berkonsultasi dengan yang diwakilinya. Tindakan anggota dewan ditentukan oleh isu atau materi yang dibahasnya

the concept of delegated representation. Konsep seorang wakil adalah agen/perantara atau juru bicara yang bertindak atas nama yang diwakilinya. Menurut pengertian ini wakil tidak boleh melampaui otoritas atau kuasa yang diberikan kepadanya

the concept of microcosmic representation. Konsep ini hanya menunjukkan bahwa sifat-sifat wakil itu mempunyai kesamaan dengan sifat-sifat golongan atau kelas orang-orang tertentu yang diwakilinya. Artinya bahwa seorang wakil berada pada posisinya tersebut karena kepentingan tertentu yang bersifat organisatoris.

the concept of symbolic representation. Konsep ini menunjukkan bahwa wakil yang bersangkutan melambangkan identitas/kualitas, golongan/kelas orang tertentu yang diwakilinya

the concept of elective representation. Maksudnya dari konsep bahwa seorang wakil pada dasarnya bertindak merepresentasikan pada pemilih

the concept of party representation. Maksudnya bahwa para wakil itu tidak lagi merepresentasikan keterwakilan dengan rakyat. Wakil cenderung menjadi wakil organisasi politik atau kongkritnya adalah wakil dari partai politik

T E O R I REPRESENTASI (A H . B I R C H)



FUNGSI ANGGOTA DPR DAN HUBUNGANNYA DENGAN KONSTITUEN

BERDASARKAN UUD 1945, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (DPR RI) MEMILIKI **TIGA FUNGSI UTAMA** DALAM MENJALANKAN TUGASNYA SEBAGAI WAKIL RAKYAT, YAITU FUNGSI LEGISLASI, FUNGSI ANGGARAN, DAN FUNGSI PENGAWASAN



LEGISLASI

DAS SOLEN

DPR MEMBENTUK UU SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAN ASPIRASI MASYARAKAT (KONSTITUENNYA)

DAS SEIN

DALAM BEBERAPA KASUS DPR MEMBENTUK UU TIDAK SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAN ASPIRASI MASYARAKAT (KONSTITUENNYA) KARENA ADANYA KEPENTINGAN POLITIK

ANGGARAN

DPR DAPAT MEMAKSA EKSEKUTIF UNTUK MEMPRIORITASKAN ANGGARAN SESUAI DENGAN KEBUTUHAN KONSTITUENNYA.

FUNGSI ANGGARAN DPR HANYA FORMALITAS, KARENA PENGGUNAAN ANGGARAN HARUS MENYESUSIAKAN PROGRAM EKSEKUTIF

PENGAWASAN

DPR DAPAT MENGAWASI KERJA PEMERINTAH HINGGA TINGKAT PALING BAWAH AGAR SESUAI DENGAN SEMESTINYA

DALAM BANYAK KASUS BANYAK HASIL-HASIL RAPAT DI DPR HANYA SEBATAS FORMALITAS TANPA ADA TINDAK LANJUT DI LAPANGAN

Seharusnya anggota legislatif akan selalu berjuang dan bekerja berdasarkan tuntutan, keinginan, dan kepentingan politik konstituennya, namun pada kenyataannya ada kebijakan partai, kebijakan eksekutif, dan kompromi politik di tingkat elit yang membuat hal tersebut belum bisa dilaksanakan secara sempurna, menunjukkan ada jarak antara teori dan praktek.

DILEMA DEMOKRASI PERWAKILAN DI INDONESIA SAAT INI



1. MEMILIH ANTARA PATUH PADA SUARA RAKYAT PEMILIH ATAU TUNDUK PADA ATURAN DAN KEBIJAKAN PARTAI.
2. HUBUNGAN YANG TIDAK SEHAT DENGAN WARGA: ANTARA ANGGOTA DEWAN SERING LUPA PADA KEBUTUHAN DAERAH PEMILIHAN SETELAH MEREKA MENANG PEMILU DAN DUDUK DI KURSI JABATAN ATAU DISISILAIN KONSTITUEN YANG MENUNTUT BERLEBIHAN DILUAR KEMAMPUAN DAN KEWENANGAN ANGGOTA LEGISLATIF. HUBUNGAN LEBIH BERSIFAT TRANSAKSIONAL KETIMBANG EMOSIONAL.
3. BIAYA POLITIK MAHAL: PEMILU YANG MAHAL MEMBUAT WAKIL TERPILIH HARUS MENGEMBALIKAN MODAL TERLEBIH DAHULU SEBELUM BISA MELAYANI PUBLIK
4. PENGARUH OLIGARKI: KEBIJAKAN NEGARA KERAP DIKUASAI OLEH SEGELINTIR ELITE- ELITE YANG MENGENDALIKAN KEBIJAKAN.

DAMPAK DARI DILEMA DEMOKRASI PERWAKILAN

Kualitas demokrasi dimana proses demokrasi hanya dimaknai sebagai memilih wakil rakyat yang tidak ada hubungannya dengan kebijakan publik yang dibuatnya. Para wakil rakyat hanya sibuk dengan dirinya dan partainya ketimbang memperjuangkan kepentingan masyarakat. Ketidakberpihakan para anggota legislatif memperlihatkan keterputusan mandat dari rakyat

Defisit demokrasi terjadi karena setelah terpilih menjadi wakil rakyat/pejabat publik tidak memiliki hubungan sistemik dengan rakyat pemilihnya. Begitu sudah terpilih menjadi anggota legislatif hubungan dengan konstituennya juga terputus. Dengan kata lain, rakyat hanya dibutuhkan ketika hari pemilihan. Kalau mereka sudah duduk di legislatif, sulit untuk selalu bisa SELALU mengaspirasikan sura rakyat.



BAGAIMANA MEMPERBAIKI KONDISI INI ?

MEMPERBAIKI KUALITAS PARTAI MERUPAKAN SATU-SATUNYA JALAN UNTUK MEMPERBAIKI KONDISI INI. KARENA PARTAI DALAM SISTEM POLITIK INDONESIA SAAT INI SUDAH MEMILIKI POSISI STRATEGIS SEBAGAI WADAH UNTUK REKRUITMEN ELIT POLITIK NASIONAL BAIK ITU LEWAT LEGISLATIF MAUPUN EKSEKUTIF.

KARENA KESALAHAN BESAR REFORMASI ADALAH KITA SUDAH MEMPERSIAPKAN SEMUA INFRASTRUKTUR POLITIK YANG DEMOKRATIS TETAPI LUPA MEMPERSIAPKAN PARTAI POLITIK KITA UNTUK SIAP MENERIMA TANGGUNGJAWAB YANG BEGITU BESAR DALAM SISTEM DEMOKRATIS INI.



MEMPERBAIKI SISTEM KANDIDASI INTERNAL PARTAI PEMILIH UNTUK MENGENALI DAN MEMPELAJARI JEJAK REKAM KANDIDAT DAN PERLU KETERLIBATAN MASYARAKAT YANG LEBIH BESAR DALAM PROSES SELEKSI CALON ANGGOTA DPR



PEMBERIAN OTONOMI POLITIK ANGGOTA LEGISLATIF YANG LEBIH BESAR SESUAI DENGAN KEDUDUKAN MEREKA SEBAGAI WAKIL RAKYAT



TERIMA KASIH